

Sosialisasi dan Pelatihan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kelurahan Batunadua Jae Padangsidempuan

Indra Syahputra Marpaung ¹, Tri Eva Juniasih ², Rina Tiur Lona ³, Nurbaya Harianja ⁴
^{1,2,3,4} Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan
Co.Author email : marpaungmdn@gmail.com

Article History :

Received : 17 Agustus 2021 Revised : 30 Agustus 2021 Accepted : 30 Agustus 2021

Abstrak : Tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan yang baik dalam membangun wilayahnya adalah pengelolaan pemerintahan yang mengatur desa/kelurahan harus berpedoman pada indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpatokan pada peraturan yang berlaku. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi kelurahan yang benar merupakan salah satu hal yang mendukung untuk mewujudkan pembangunan kelurahan dan kesejahteraan masyarakat kelurahan yang dipimpinnya. Pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa sosialisasi dan pelatihan tata kelola administrasi di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua Padangsidempuan Kota Padangsidempuan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pegawai dalam mengelola dan menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pelayanan masyarakat agar pembangunan desa di wilayah kelurahan tersebut dapat terwujud secara merata. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan sikap pegawai dalam melayani publik, kemampuan melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam menggunakan komputer sudah meningkat.

Kata Kunci : **Sosialisasi, Pelatihan, Tata Kelola, Administrasi**

Abstract : In developing its territory, good urban village administration governance is that the government that regulates urban villages must uphold transparency, accountability, responsibility, independence, and equality/fairness and adhere to the applicable rules and procedures. Good urban village administration will be a supporting factor in the development of the village and the welfare of the village community leads. This community service is one of the Tri Dharma of Higher Education implementations in socialization and training on administrative governance in Batunadua Jae Village, Batunadua Padangsidempuan District Padangsidempuan City. This service activity aims to improve the ability and understanding of employees in managing and carrying out their duties and functions, especially in community services, so that village development in the urban village area can be realized evenly. Based on the results of the evaluation, it was concluded that there was an increase in the attitude of employees in serving the public, the ability to carry out the governance of government administration both in public service and in using computers had increased.

Keywords : **Socialitation, Training, Governance, Administration**

LATAR BELAKANG

Saat ini Pemerintah Indonesia gencar-gencarnya dalam membangun wilayah yang merata karena saat ini jumlah penduduk Indonesia hampir 80% tinggal di pedesaan dengan berbagai macam pekerjaan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat ini otonomi daerah sangat berperan penting dalam terlaksananya pembangunan bangsa dan salah satunya pembangunan desa. Pengelolaan desa sesuai dengan sistem pemerintahan kelurahan yang diturunkan ke pemerintahan desa yang meliputi daerah kelurahan tersebut. Untuk mengelola suatu kelurahan dengan baik dengan semua potensi yang ada di desa tersebut, pejabat kelurahan dan pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan kelurahan. Dasar utama pemerintahan adalah pemerintahan di desa/kelurahan. Pimpinan pemerintahan tingkat kelurahan adalah Kepala Kelurahan atau Lurah

Pemerintah desa perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyusun administrasi agar teratur dan benar. Pengelolaan administrasi tersebut berupa penyusunan data dan informasi tentang tujuan dan sasaran yang telah direncanakan untuk terselenggarakannya pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Hal ini digunakan sebagai titik panduan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan seluruh kegiatan desa/kelurahan (Pusat, 2014).

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan yang dalam sistem pengelolaannya terdapat hak otonomi. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah dengan status Aparatur Negeri Sipil dan dalam pemerintahannya oleh beberapa pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer. Kelurahan memiliki hak dalam menjalankan dan mengatur wilayah yang terbatas yang terdiri dari beberapa lingkungan dengan kepala lingkungan masing-masing. Kelurahan adalah wilayah kerja seorang lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota dibawah kecamatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak dipilih oleh rakyat (Bratakusumah and Solihin, 2002). Kelurahan yang berhasil identik dengan pembangunan wilayah yang dipimpinnya berhasil juga. Tahapan dari pelaksanaan pembangunan kelurahan dimulai dengan tahapan perencanaan, penyusunan potensi-potensi yang ada di wilayah kelurahan, mengidentifikasi, serta melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk pembangunan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat sehingga menciptakan sistem administrasi yang benar dan lengkap (Negeri, 2015). Ketertiban sistem administrasi yaitu dengan tersedianya buku administrasi kelurahan untuk kemajuan desa/kelurahan yang meliputi buku administrasi umum, kependudukan, pembangunan dan sebagainya.

Tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan yang baik dalam membangun wilayahnya adalah pengelolaan pemerintahan yang mengatur desa/kelurahan harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi kelurahan untuk pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan tertib administrasi adalah dengan menguasai dan memahami sistem administrasi yang berlaku. Penyelenggara kelurahan dan desa akan semakin mudah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing, dapat meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan laporan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemerintahan yang benar adalah terselenggaranya sistem administrasi dengan menggunakan berbagai aplikasi dengan konsep yang bergantung pada hubungan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zulkarnain, 2020). Salah satu tujuan pengelolaan administrasi yang baik adalah peningkatan partisipasi pemerintah dalam membangun wilayahnya yang meluas dan efektif.

Untuk mencapai pengelolaan administrasi kelurahan yang efektif dan efisien harus ada pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan dan wawasan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Berdasarkan kenyataan terjadi di lapangan bahwa kerjasama antara aparat pemerintah kelurahan dengan aparat desa belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan belum dikelola secara efektif dan efisien. Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan terdiri dari 7 lingkungan. Dalam pengelolaannya, masih ada pembangunan desa yang jauh tertinggal. Kelurahan sangatlah berperan penting untuk kemajuan desanya. Peran kelurahan adalah dalam membina, mengawasi, memfasilitasi, dan mengadakan konsultasi. Pelaksanaan pengelolaan administrasi di Kelurahan Batunadua Jae belum terlaksana secara maksimal dan masih jauh dari yang diharapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016.

Menurut John Pierre dalam Yusid Toyib, Riant Nugroho (Yusid Toyib, 2018) tata kelola merujuk pada koordinasi yang terus menerus dan koheren antar-berbagai pelaku dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Pelaku tersebut dapat berupa aktor politik, institusi, kelompok, masyarakat sipil, non-pemerintah, dan organisasi transnasional. Nurdizal M. Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, tata kelola adalah suatu aturan yang berlaku pada suatu organisasi dengan berpatokan kepatuhan hukum yang

berlaku, kode etik, transparansi, dan akuntabilitas (Rachman, Efendi and Wicaksana, 2011). Menurut Yanssen menjelaskan bahwa administrasi desa/kelurahan meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi penunjang dalam pembangunan kelurahan (Yansen, 2014). Liang Gie (Mufiz, 2016) menyebutkan bahwa administrasi merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bentuk hubungan kerjasama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditentukan.

Tata kelola pemerintahan kelurahan Batunadua Jae dihadapkan pada berbagai masalah diantaranya sulitnya mendapat pelayanan yang baik, respon para pegawai terhadap kebutuhan masyarakat sangat lambat, informasi sulit diperoleh dan tidak akurat. Selain itu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah pegawai yang tidak tepat waktu dalam bekerja sehingga masyarakat lama menunggu misalnya dalam mengurus surat-surat, serta biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat tidak jelas.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta terwujudnya pembangunan desa yang merata, pihak pemerintah kelurahan Batunadua Jae harus terlebih dahulu memperhatikan semua faktor pendukung yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini. Penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai fokus utama yaitu menjawab dan memenuhi keinginan masyarakat di kelurahan yang membutuhkan pelayanan secara maksimal. Konsep penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan adalah suatu urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan terdiri dari 11 asas yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, serta partisipatif. Tata kelola yang benar memiliki lima prinsip dasar yang terkandung yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran (Daniri, 2005).

Dari penjelasan diatas, penulis dan tim merasa tertarik dan menganggap penting untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa sosialisasi dan pelatihan tata kelola administrasi di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Batunadua Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pegawai dalam mengelola dan menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam pelayanan masyarakat agar pembangunan desa di wilayah kelurahan tersebut dapat terwujud secara merata. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi tentang sistem tata kelola pemerintahan kelurahan dan pelatihan sistem informasi agar pegawai mampu melayani masyarakat serta informasi yang diperoleh masyarakat cepat dan akurat.

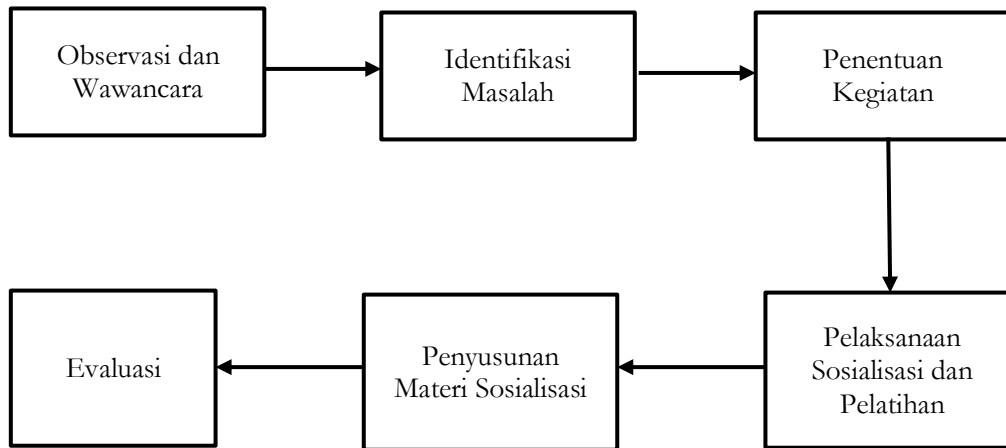
METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu melalui penyuluhan/ sosialisasi tata kelola pemerintahan kelurahan membutuhkan metode yang relevan dan didasarkan pada latar belakang masalah diatas. Tahap awal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan dan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan menyangkut masalah yang terdapat di kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua. setelah selesai mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan koordinasi dengan pejabat kelurahan untuk menentukan jadwal, materi sosialisasi, serta sarana yang menunjang terlaksananya kegiatan tersebut.

Pada tahap pelaksanaan, langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Materi yang akan dipaparkan yaitu mekanisme, tata kelola, dan strategi tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan. Dalam pengabdian ini, tim pengabdian terdiri dari 3 orang dosen. Tempat kegiatan berlangsung di aula kantor Kelurahan Batunadua Jae. Menjelang akhir kegiatan, diberikan waktu tanya jawab kepada peserta menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi

yang dipaparkan. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan, tim pengabdian akan mengevaluasi peserta dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman dan kemampuan para peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan Batunadua Jae.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Adapun tahapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tata kelola administrasi yaitu seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Tata kelola Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Pertemuan	Materi Pengabdian	Waktu	Alat/Bahan
I	Mekanisme dan tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan	30 menit	Powerpoint/proyektor
II	Strategi Tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan yang baik (<i>good corporate governance</i>)	30 menit	Powerpoint/proyektor
III	Pelatihan sistem administrasi dengan menggunakan komputer (Microsoft word dan excell)	100 menit	Video/komputer/proyektor Praktek lapangan
IV	Tanya jawab	30 menit	Praktek lapangan
V	Evaluasi	30 menit	Praktek lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini, fokus utama yang akan dilakukan yaitu penyampaian materi tentang tata kelola administrasi dan pelatihan tata kelola seperti penyusunan administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan, dan pembuatan dokumen di komputer dengan menggunakan aplikasi office (Ms.Word, Ms.Excel). hal ini membantu kinerja para pegawai di kelurahan agar lebih efektif dalam proses pelayanan administrasi. Sosialisasi dan pelatihan ini diharapkan dapat menerima materi yang telah dipaparkan dengan pendampingan khusus karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi dan melatih peserta dalam mengoperasikan komputer yang dilengkapi dengan modul.

Sebelum kegiatan sosialisasi dan pelatihan terlaksana, terdapat beberapa temuan yaitu pemahaman sistem tata kelola administrasi para peserta masih kurang maksimal. Banyak peserta yang masih kurang dalam mengelola arsip dengan baik. Melalui rangkaian kegiatan yang terencana baik, maka tujuan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini akan dapat tercapai secara maksimal dan memperoleh manfaat baik langsung maupun tak langsung bagi peningkatan layanan publik. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dengan cara memberikan latihan berupa praktik tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan yang dilakukan oleh para peserta pelatihan. Masing-masing peserta diberikan kesempatan mengaplikasikan berbagai materi yang telah disampaikan pemateri. Hal ini akan dievaluasi oleh tim pengabdian dengan memberikan masukan kepada para peserta. Berikut hasil evaluasi tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan yang dilaksanakan peserta pelatihan yang berjumlah 12 orang.

Tabel 2. Persentase Penilaian Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

No	Indikator Penilaian	Persentase (%)
1	Memiliki sikap sebagai pegawai yang melayani publik	75
2	Kelengkapan administrasi surat menyurat	83
3	Pengetahuan tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan	83
4	Kemampuan mempraktekkan tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan baik dan benar	75
5	Kemampuan memperoleh informasi terbaru dan akurat	83
6	Memiliki skill dalam mengoperasikan komputer	60
7	Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam melayani publik	91,6

Berdasarkan tabel di atas, hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu berupa sosialisasi dan pelatihan dalam menyelesaikan masalah tersebut, dicapai hasil diantaranya:

1. Bertambahnya wawasan para pegawai mengenai pentingnya pengelolaan administrasi kelurahan terutama tentang kearsipan dan pelayanan prima.
2. Terdapat peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme dan tata kelola pemerintahan kelurahan.
3. Peserta mampu menata dan mengelola arsip dengan baik dan benar.
4. Para peserta mampu membuat strategi tata kelola administrasi pemerintahan terutama dalam pelayanan masyarakat.
5. Meningkatnya kesadaran peserta akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara keseluruhan mendapat respon positif oleh peserta yaitu pegawai kelurahan Batunadua Jae. Sosialisasi dan pelatihan tata kelola administrasi ini diikuti oleh seluruh pegawai, staf honorer, dan kepala lingkungan. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan para pegawai tentang tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan sikap pegawai dalam melayani publik, penyusunan dan melengkapi surat menyurat (arsip) sudah paham serta dapat dilengkapi dengan baik dan benar, kemampuan melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam menggunakan komputer sudah meningkat. Untuk kedepannya, diharapkan kegiatan dan pelatihan dengan topik yang berbeda dapat dilaksanakan secara

berkesinambungan. Hal ini untuk meningkatkan keahlian para pegawai agar lebih mampu bekerja secara profesional, lebih kreatif dan inovatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan rekomendasi untuk melakukan pengabdian masyarakat ini. Terimakasih juga kepada pejabat kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang telah memberikan tempat dan waktu serta kepada para peserta yang telah ikut berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tata kelola administrasi pemerintahan di Kelurahan Batunadua Jae.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, D. S. and Solihin, D. (2002) Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Daniri, M. A. (2005) Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Ray Indonesia. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=UQXtAAAAMAAJ>.
- Mufiz, A. (2016) 'Pengantar ilmu administrasi negara', Jakarta: Graha Ilmu.
- Negeri, P. M. D. (2015) Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Indonesia.
- Pusat, P. (2014) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indonesia: LN. 2014 No. 113, TLN No. 5539, LL SETNEG : 71 HLM.
- Rachman, N. M., Efendi, A. and Wicaksana, E. (2011) Panduan lengkap perencanaan CSR. Penebar Swadaya.
- Yansen (2014) Revolusi dari Desa : saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat. Edited by D. Mawardi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yusid Toyib, R. N. (2018) Transformasi Public Private Partnership Indonesia. PT Elex Media Komputindo. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=bEBIDwAAQBAJ>.
- Zulkarnain, D. (2020) 'Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau', PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1). doi: 10.25299/jiap.2020.vol6(1).4998.